

Civitas akademika Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM
MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES
 kepada wisudawan dan wisudawati Periode I Tahun 2019
SEMOGA SUKSES DALAM MERAIH MASA DEPAN

Wisudawan/Wisudawati Prodi Ilmu Pemerintahan Periode I Tahun 2019



Annasrul Nur Azis
201410050311087



Eko Budi Santoso
201410050311164



Hanan Nazah Anili
201410050311059



Istayu Pratistaning
201410050311129



Nizar Syahrindra S
201310050311167



Ulvi Istiqomah
201410050311098



Willy Richard Permadi
201410050311138



Aditya Nugrahaning P
201310050311072



Risna Sari
201410050311024



Aswan
201410050311049



Nicky Nastiti K.D
201410050311062



Melisa Sari Nastiti
201410050311084



Qomaruddin Sirih P
201210050311059



Ikhtiar Rahmatullah
201210050311048



Firman Wahyudi
201210050311051



M. Hasan
201210050311027



Ericha Puji Rhamadani
201210050311002



Dyah Wahyuningsih
201410050311114



Fuad Hanif F
201410050311127



Muhammad Taufik
201410050311145



Rijadiyan Fatmawati
201410050311166



Muhamad Yoda Firnando
201210050311113



Nafis Alieyya M
201410050311090



Mohammad Fahrin
201210050311038



Moh. Fathurrahman
201310050311080

Pengarah Redaksi : Salahudin
 Penanggungjawab : Asep Nurjaman, Tri Sulistyarningsih, Krislino Hadi, Yana S. Hiji, Samran
 Redaktur Pelaksana : Ach. Apriyanto Romadhan, Muhammad Kamil
 Tata Usaha dan Dokumentasi : Jainuri, Musaddat Dwi Pramana
 Reporter : Laely Nur Khanifah, Iradhat Taqwa S, Lisiana Asworo
 Diterbitkan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM
 Jl. Raya Tlogomas 246 Malang Telp. 0341-466318 Psw.131
 Website : pemerintahan.umm.ac.id
 Email : ipumma.28@gmail.com; ipemummm86@gmail.com
 Redaksi menerima tulisan mahasiswa melalui karya tulis secara bebas, dinamis, dan kreatif.
 Penyerahan naskah tulisan dimulai pada acara wisuda sampai dua minggu sebelum wisuda periode berikutnya.



ProdIP News
 Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP-UMM
 Strengthening Effective Government



Diterbitkan Oleh Prodi Ilmu Pemerintahan
 Website: pemerintahan.umm.ac.id

Edisi I/TH XIX/Februari/2019

Salam ProdIP News

Membangun Jaringan Dalam Pengembangan Perguruan Tinggi Dimasa Depan

Pembaca Prodip News Edisi I 2019 yang berbahagia, pada salam edisi kali ini Program Studi Ilmu Pemerintahan (Prodi IP) FISIP UMM, dengan bangga menyampaikan serangkaian kegiatan Prodi dalam kurun waktu Desember 2018 - Februari 2019. Dalam kurun periode ini fokus utama yang dilakukan adalah membangun relasi/jejaring dan kerjasama dengan lintas sektor khususnya dunia perguruan tinggi lintas negara dan birokrasi pemerintahan. Program tersebut diwujudkan dalam tiga kegiatan. *Pertama*, *Student Exchange Programme* dengan College of Local Administration (COLA) Khon Kaen University, Thailand. Sejahter ini selain penyambutan bersama jajaran Dekanat FISIP UMM pada peserta SE asal Thailand ini juga dilakukan Diskusi Bertajuk "Comparative System Between Indonesia and Thailand, Dialog Antar Budaya dengan Mahasiswa Thailand.

Kedua, program Studi Exercursie ke beberapa Kementerian Pemerintah Republik Indonesia, tujuannya untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam mengenai

manajemen tata kelola pemerintahan di Indonesia melalui kegiatan diskusi dengan pejabat pemerintahan yang dilakukan selama program ini berlangsung. Selain itu kunjungan ini untuk menguatkan kerjasama Magang Riset Pemerintahan - sebuah program unggulan Prodi IP dimana mahasiswa melakukan magang selama 3 bulan di beberapa Kementerian RI. *Ketiga*, dialog interaktif Kepala Prodi IP (narasumber) dalam Rencana Perampingan SKPD di Kota Malang di radio City Guide FM.

Prodi IP menyadari sepenuhnya bahwa jaringan sangat penting dalam pengembangan Perguruan Tinggi dimasa depan. Untuk itu diperlukan sebuah visi-misi yang adaptif sehingga mampu mendukung pengembangan mahasiswa dan alumni yang berdaya saing tinggi. Maka, Prodi IP juga melakukan lokakarya kurikulum dan Visi-Misi agar pengelolaan prodi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini dan kedepannya. []

* Pengarah Redaksi,
 dan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM



Salahudin, S.I.P., M.Si, M.P.A.

Government Science Activities

Sambut Mahasiswa *Student Exchange* Khon Kaen University-Thailand, Prodi Ilmu Pemerintahan Perluas Kejasama Luar Negeri

Prodi Ilmu Pemerintahan (IP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tengah melakukan upaya percepatan untuk *go International*. Upaya ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas program studi, salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri yang mempunyai reputasi baik. Kerjasama Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Collage of Local Administration (COLA) Khon Kaen University (KKU) Thailand merupakan salah satu upaya prodi untuk *go international*. Bentuk kerjasama antar kedua lembaga ini berupa *Student Exchange* program atau pertukaran mahasiswa, dimana mahasiswa dari COLA-KKU akan belajar selama 4 bulan di Universitas Muhammadiyah Malang.

Tercatat sebanyak 4 mahasiswa dari COLA-KKU Thailand



Mahasiswa *Student Exchange* dari COLA, Khon Kaen University Thailand dalam sesi foto bersama dengan Pimpinan Dekanat FISIP dan Pimpinan Prodi Ilmu Pemerintahan

yang tergabung dalam program di atas mendapat kesempatan untuk belajar di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM. Mereka akan belajar tentang sistem pemerintahan Indonesia sekaligus belajar tentang budaya Indonesia khususnya Budaya Jawa Timur.

Bertempat di Ruang Seminar FISIP UMM (8/1), Prodi Ilmu Pemerintahan menyambut mahasiswa COLA-KKU untuk lebih mengenalkan lingkungan kampus UMM. Dekan FISIP, Dr. Rinikso Kartono, M.Si, langsung menyambut

kompat mahasiswa dari KKU. Sambutan juga diberikan oleh Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Salahudin, S.I.P., M.Si, M.P.A. Kerjasama antara UMM dan KKU akan diperkuat lagi dengan melakukan kolaborasi rencana riset bersama. Hal ini sebagai langkah kongkrit Prodi Ilmu Pemerintahan untuk semakin mengglobal. []

Menyelamatkan Hak Suara Pemilih Pendetang di Kota Malang, Dosen Prodi IP Menjadi Narasumber dalam Acara Idjen Talk

Sebagai kota pendidikan terbesar ketiga yang ada di Indonesia, setelah Bandung dan Yogyakarta, Kota Malang dipadati oleh penduduk pendatang berstatus mahasiswa. Ashari Husein, S.Sos., M.Si (Komisioner KPU Kota Malang), Dr. Tri Sulistyanyingsih, M.Si (Dosen Ilmu Pemerintahan UMM) dan Oky Lesandria (Mahasiswa Universitas Merdeka Malang) dalam acara Idjen Talk yang dilaksanakan pada 14 Januari 2019 membahas tema "Menyelamatkan Hak Suara Pemilih Pendetang di Kota Malang". Acara tersebut bertujuan agar para pendatang berstatus mahasiswa di Kota Malang tidak kehilangan hak pilihnya saat pemilihan umum April mendatang.

Kegiatan tersebut membahas tentang persoalan persoalan menjelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada April 2019 mendatang, salah satunya adalah masalah hak pilih. Ashari Husein, S.Sos., M.Si (Komisioner KPU Kota Malang), mengungkapkan bahwa mahasiswa maupun pelajar diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum April mendatang walaupun tidak melakukan pemilihan di daerah asalnya. Terdapat kebijakan pindah pilih agar mahasiswa maupun



Dosen Prodi IP, Assoc. Prof. Dr. Tri Sulistyanyingsih (dua dari kiri) dalam sesi foto bersama setelah acara diskusi.

pelajar dari luar Kota Malang tetap bisa berpartisipasi dalam pemilu. Proses pindah pilih ini bisa diurus di kantor KPU atau pada petugas PPS yang ada di kelurahan. Syaratnya, yang bersangkutan harus datang sendiri dengan membawa KTP, serta sudah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) daerah asalnya. Untuk itu, masyarakat pendatang harus segera mengurus pindah pilihnya sebelum masa pengurusannya berakhir.

Assoc. Prof. Dr. Tri Sulistyanyingsih, M.Si (Dosen Ilmu Pemerintahan UMM) menjelaskan bahwa masyarakat pendatang, terutama pelajar

mengalami keresahan untuk menggunakan hak pilih dikarenakan aksesibilitas. Sebagaimana kita ketahui pelajar yang ada di Kota Malang bukan hanya berasal dari daerah Malang dan Jawa saja, namun juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dan umumnya mereka mengalami kesulitan untuk menggunakan hak pilih jika harus kembali ke kampung halaman mereka. Beliau menambahkan bahwa melakukan pindah pilih memiliki konsekuensi terkait pemberian surat suara. Mereka hanya akan menerima surat suara pemilihan presiden saja saat pemilu dan tidak bisa mendapatkan surat suara pemilihan DPRD kota maupun provinsi. []

Dialog Interaktif, Kaprodi IP Menjadi Narasumber dalam Rencana Perampingan SKPD di Kota Malang

Rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Malang seperti ini perlu pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kota kedepannya. Wacana untuk meleburkan Dinas Pariwisata kedalam Dinas Pemuda dan Olahraga memerlukan kajian yang komprehensif dari Pemerintah Kota Malang dan DPRD yang tentunya perlu melibatkan masukan dan saran dari publik. Pendapat tersebut disampaikan oleh Salahudin, S.IP., M.Si, M.PA selaku Ketua Prodi IP UMM dalam dialog interaktif di Radio City Guide 911 FM pada 17-18 Januari 2019. Dialog yang berjalan kurang lebih selama 1 jam ini juga melibatkan anggota DPRD dan perwakilan Pemerintah Kota Malang.

Salahudin dalam pemaparannya melihat bahwa secara normatif wacana ini merupakan sebuah langkah yang strategis dalam melakukan efisiensi anggaran dan optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) birokrasi. Namun rasionalisasi demikian kurang tepat jika dihubungkan dengan prinsip Otonomi Daerah yang menuntut pemerintah daerah memberdayakan potensi daerah. Dalam hal ini rencana penyatuan ini tidak sesuai dengan



Kaprodi IP (kiri) pada sesi foto bersama setelah acara dialog interaktif di radio City Guide FM Malang.

upaya memaksimalkan potensi wisata di Kota Malang. Fusi OPD seperti ini dikhawatirkan dalam jangka panjang membuat potensi wisata di Kota Malang tidak terkelola dengan baik. Perampingan seperti ini akan membuat fokus pada pengembangan pariwisata semakin sulit dilakukan. Padahal sebetulnya, Kota Malang memiliki banyak potensi wisata lokal dan khas yang jika dikelola dengan baik akan meningkatkan perekonomian daerah. []

Lebih lanjut Salahudin menyarankan agar rencana kebijakan seperti ini perlu kajian mendalam dengan melibatkan para stakeholder terkait khususnya DPRD dan masyarakat. Hal ini penting agar prinsip partisipasi dalam pengambilan kebijakan yang bertujuan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat sasaran dapat didapatkan. Idealnya memang kata Salahudin, perampingan OPD perlu proses yang panjang dan matang. Tidak bisa dilakukan secara terburu-buru apalagi hanya demi pertimbangan efisiensi anggaran dan birokrasi. Agar tidak menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang lebih buruk dikemudian hari, rencana perampingan ini perlu ditinjau ulang. []

Prodi IP Selenggarakan Diskusi Bertajuk "Comparative Political System Between Indonesia and Thailand"

Diskusi komparasi budaya, sistem pemerintahan, dan politik, diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, sebagai bagian dari rangkaian *Student Exchange* Khon Kaen University (KKU) dan IP UMM (22/1). Bertempat di Ruang 611 GKB I FISIP, kegiatan ini mendiskusikan tentang sistem budaya dan politik di masing-masing negara.



Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan berdiskusi dengan mahasiswa Student Exchange dari Cola, Khon Kaen University Thailand.

Diskusi ini langsung dibuka oleh Kaprodi IP, Salahudin, S.IP, M.Si, M.PA.

Presentasi pertama disampaikan oleh empat mahasiswa KKU-Thailand, Kanarwut Duangin, Mintra Wongwirat, Sittsak Kacothanmanukun, Suparom Wongracha. Masing-masing dari mereka secara bergantian mempresentasikan materi tentang sistem politik dan budaya yang ada di negara Thailand. Sistem politik dan sistem budaya negara Thailand berbeda

dengan negara Indonesia. Sistem pemerintahan Thailand berbentuk Monarki Konstitusi dengan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri langsung dilantik oleh raja. Parlemen Kerajaan Thai menggunakan sistem dua kamar yakni, Majelis Nasional dan Senat. Sementara, budaya yg ada di Thailand lebih diwarnai oleh sistem Kerajaan yang ada di sana. Raja begitu dihormati dan disanjung, sehingga seluruh kebijakan Raja tidak boleh ditentang.

Presentasi kedua disampaikan oleh mahasiswa Prodi IP, Tia

Marwah, yang menyampaikan tentang gerakan mahasiswa 1998 yang merombak sistem politik dan budaya Indonesia. Selanjutnya, dibahas mengenai implikasi dari reformasi 1998 yakni adanya pemilu yang demokratis. Pembahasan ini disampaikan oleh mahasiswa Prodi IP, Danang Kurniawan. Tujuan diadakan diskusi ini adalah sharing pengetahuan tentang sistem politik dan budaya dari masing-masing negara. Diharapkan dengan adanya diskusi ini, Indonesia dan Thailand lebih saling mengenal melalui program *Student Exchange* seperti yang telah dilakukan oleh Prodi IP-UMM. []

Prodi Ilmu Pemerintahan Gelar Dialog Antar Budaya dengan Mahasiswa Thailand

Prodi Ilmu Pemerintahan UMM tidak henti-hentinya mendukung mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM untuk mengasah bakat dan kemampuan melalui kegiatan talkshow bersama Mahasiswa Pertukaran dari COLA Khon Kaen University, Thailand, Rabu 23 Januari 2019.

Acara ini dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa dari prodi Ilmu Pemerintahan serta Mahasiswa Pertukaran dari COLA Khon Kaen University, Thailand. Dalam acara ini, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan Mahasiswa Pertukaran dari Thailand menjelaskan mengenai Budaya dari Negara mereka masing-masing. Pemaparan diawali oleh Mahasiswa Thailand yang menjelaskan mengenai Kebudayaan di Thailand.

Thailand merupakan Negara yang sangat menghormati Raja dan Ratuinya. Zaman moderen seperti saat ini tidak membuat masyarakat Thailand melupakan kebudayaan yang telah ada, seperti mengucapkan salam jika bertemu orang lain dan juga ucapan terimakasih. Ujar Suparom Mahasiswi Cola KKU, Thailand. Mengucapkan salam dan terimakasih merupakan kewajiban bagi masyarakat Thailand jika bertemu orang lain. Hal ini dilakukan untuk menghormati dan menghargai orang. Jika



Mahasiswa Student Exchange dari Cola, Khon Kaen University Thailand dalam sesi foto bersama dengan Dosen dan Mahasiswa Prodi IP.

melakukan sedikit saja kesalahan, maka mereka secara langsung mengucapkan maaf.

Salah satu Mahasiswa Thailand, Mintra juga menjelaskan bahwa Thailand memiliki beberapa tradisi yang berbeda disetiap daerah. Tetapi Thailand memiliki perayaan yang diikuti oleh seluruh masyarakat secara bersamaan, seperti acara penerbangan roket yang diadakan setelah musim hujan dan dirayakan oleh seluruh masyarakat di Thailand.

Selain menjelaskan mengenai kebudayaan, Mahasiswa Thailand juga menjelaskan mengenai makanan Tradisional Thailand. Mintra mengakui bahwa makanan Thailand sangat berbeda dari segi rasa, tetapi dari segi bahan beberapa hampir sama dengan makanan di Thailand.

Setelah Mahasiswa Thailand menjelaskan mengenai kebudayaan Thailand, sebanyak 5 mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM juga menjelaskan mengenai Kebudayaan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, kebudayaan, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Itulah yang membuat Indonesia menjadi negara yang menarik, meskipun berbeda-beda tetapi dapat disatukan dengan Pancasila. Ujar Riko, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM. []

Bekali Pengalaman Empiris, Prodi IP Berangkatkan 200 Mahasiswa Untuk Ikuti *Study Excursie* (SE) Ke Kementerian RI

Prodi Ilmu Pemerintahan UMM, memberangkatkan 200 mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk mengikuti program *Study Excursie* (SE) (Minggu, 13/1). Program SE sendiri adalah program Unggulan Prodi Ilmu Pemerintahan dimana mahasiswa Ilmu Pemerintahan diajak untuk belajar langsung bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.

Tahun ini, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 melakukan kunjungan ke 9 Kementerian dan Lembaga, diantaranya: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Pertanian RI, Kantor Gubernur Jawa Barat, dan yang terakhir Kantor Walikota



Peserta SE Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan dalam sesi foto bersama di Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Bandung dengan didampingi oleh dua Dosen Muda IP, yakni Ach. Apriyanto R, M.Si dan Listiana Asworo, MA. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, terhitung dari tanggal 14 Januari hingga 18 Januari 2019.

Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Salahudin, S.IP, M.Si, M.PA, langsung memimpin pemberangkatan mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan, "program SE merupakan program Unggulan Prodi IP, karena kita bisa langsung belajar dari pelaku Tata Kelola Pemerintahan sendiri. Sehingga, kawan-kawan bisa memanfaatkan kegiatan

ini untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang Pemerintahan secara langsung", ujarnya. Kaprodi juga menyampaikan jika program SE ini juga menjadi jembatan atau langkah awal bagi mahasiswa yang akan berencana Magang Riset di



Peserta SC Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan dalam sesi foto bersama di gedung DPR RI

Program SE 2018 juga menjadi special karena 4 mahasiswa asal Khon Kaen University (KKU) Thailand, juga turut serta dalam rombongan. Mereka adalah Kanarwut Duangin, Mintra Wongwirat, Sittisak Kaeothanmanukun, dan Suparom Wongracha. Mahasiswa asal KKU Thailand ini berkesempatan untuk belajar tentang Sistem Pemerintahan Indonesia yang tentunya berbeda dengan negara Thailand. "Ikuti serta dalam program ini menjadi kebanggaan untuk saya dan teman-teman, karena kami bisa berkunjung dan belajar langsung bagaimana sistem dan tata kelola pemerintahan Negara Indonesia", kata Sittisak. Keikutsertaan mahasiswa KKU dalam program SE ini karena mereka sedang mengikuti program Student Exchange yang diselenggarakan Prodi IP UMM dengan COLA, KKU, Thailand. Keempat Mahasiswa ini akan belajar di Prodi IP selama 4 bulan.

Program SE sendiri bertujuan untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam mengenai manajemen tata kelola pemerintahan di Indonesia melalui kegiatan diskusi dengan pejabat pemerintah yang dilakukan selama program ini berlangsung. Mahasiswa prodi IP menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapat kepada pemerintah,

Kiprah Mahasiswa

Kunjungi Museum Konferensi Asia-Afrika, Mahasiswa Prodi IP Perdalam Wawasan Sejarah Kebangsaan

Masih dalam rangkaian program *Study Excursion* (SE) mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan keberbagai kementerian dan lembaga, Kamis, 17 Januari 2019 di sela-sela kunjungan tersebut rombongan SE menyempatkan diri berkunjung ke Museum Asia-Afrika (KAA) di Bandung. Kunjungan ini di sambut langsung oleh Kepala Museum KAA Meinarti Fauzie. Ana sebagai dosen pendamping dalam kunjungan ini menjelaskan maksud kunjungan ini sebagai bentuk sebuah edukasi bagi mahasiswa prodi IP bahwa museum yang terletak di Jalan Asia Afrika No. 65 ini merupakan saksi sejarah bahwa di Bandung tepatnya pada tanggal 18-24 April 1955 pernah diselenggarakan sebuah konferensi penting bertaraf Internasional.

Meinarti kemudian mengajak mengelilingi museum sambil menjelaskan latar belakang berdirinya museum Asia-Afrika melalui diorama. Meinarti menjelaskan bahwa museum ini diresmikan pada tanggal 24 April 1980 bertepatan dengan peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika dan diresmikan langsung oleh almarhum Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1980.

Menurutnya prestasi besar yang dicapai oleh Konferensi



Rombongan Prodi IP dalam sesi Foto bersama di sela-sela kunjungan ke Museum KAA

Asia Afrika telah berhasil menentukan sejarah perjalanan Dunia pada waktu itu dan kemudian setelahnya, sehingga untuk mengabadikan keberhasilan momem bersejarah tersebut maka diabadikan dengan membangun sebuah museum di tempat konferensi itu pernah berlangsung, yaitu di Gedung Merdeka Kota Bandung.

Andrian salah satu rombongan mahasiswa menuturkan bahwa dengan mengunjungi museum KAA ini dia mendapatkan pengetahuan baru bahwa "para pemimpin Indonesia merupakan pemimpin yang visioner, salah satu hasil

sejarah yang tercipta dari visi kedepan tersebut adalah terselenggaranya konferensi internasional terbesar di Bandung waktu itu. Perlu diketahui bahwa konferensi tersebut melahirkan Dasa Sila Bandung yang menjadi pedoman serta semangat bagi bangsa-bangsa di benua asia dan afrika yang waktu itu masih banyak yang terjajah untuk berjuang memperoleh hak-hak kemerdekaannya.

Kunjungan ditutup dengan sesi foto bersama antara rombongan dengan pihak museum yang dilanjutkan dengan pemberian cinderamata. Sebelum mengakhiri kunjungan Ana berarap kunjungan ini memiliki keberlanjutan kedepannya, sehingga ada kerjasama kelembagaan antara Museum KAA dengan Prodi Ilmu Pemerintahan. []

sehingga mereka mendapatkan penjelasan secara langsung dari pemerintah tentang dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Inilah esensi dari program SE, dimana mahasiswa belajar langsung bagaimana praktik Tata Kelola Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0. Selain mendapat pengetahuan dan pengalaman, mahasiswa juga mendapat hadiah atau *souvenir* dari beberapa Kementerian sebagai bentuk apresiasi terhadap mahasiswa yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pematani.

Bagi Prodi Ilmu Pemerintahan, program SE sangatlah penting. Program SE merupakan jembatan untuk melakukan penguatan kelembagaan dengan kerjasama-kerjasama dengan Institusi Pemerintahan. Sehingga, jejaring atau koneksi yang dibangun oleh Prodi IP akan semakin kuat. Sebagai contoh, Program Magang Riset yang juga menjadi program unggulan Prodi IP, juga merupakan bentuk implementasi kerjasama yang telah diselenggarakan oleh Prodi IP dengan Kementerian, Lembaga, Instansi, dan berbagai Organisasi Non-Profit. Intinya, program SE ini merupakan program pengenalan Kementerian dan Lembaga mitra Prodi kepada mahasiswa yang akan mengikuti program Magang Riset. Namun tidak hanya sekedar kunjungan kelembagaan saja, mahasiswa juga diajak untuk berdiskusi dan sharing tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan Negara Indonesia dan bagaimana mengatasi problem tersebut. Pelajaran dan pengalaman yang luar biasa tentunya. []



Peserta SE Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan dalam sesi foto bersama di Kementerian Sekretariat Negara RI

Kembangkan Mutu Akademik, Prodi IP Gelar Lokakarya Visi Misi

Kegiatan ini diikuti oleh semua dosen Prodi Ilmu Pemerintahan dan berlangsung di Ruang Sidang Senat FISIP UMM Malang. Sekprodi IP, Muhammad Kamil, S.IP, MA, membuka kegiatan Lokakarya ini dengan memaparkan kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Pemerintah kepada para Dosen IP. Kaprodi IP, Salahudin, M.Si, M.PA, menambahkan jika Kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan banyak dicontoh oleh berbagai kampus di Indonesia. "Kurikulum IP telah menjadi acuan atau pedoman bagi prodi IP seluruh kampus di Indonesia. Ini yang membanggakan. Kita selangkah lebih maju dari kampus lain, ujarnya."

Kegiatan ini merupakan pematangan sekaligus evaluasi atas beberapa kebijakan strategis yang dilakukan oleh Program Studi selama ini. Dalam persoalan visi-misi, dinamika pemerintahan yang mengarah pada *dynamic government* sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi hingga 2024. Sehingga, perlu direvisi dengan menyesuaikan orientasi visi-misi Prodi Ilmu Pemerintahan UMM pada hal tersebut. Hal ini agar kualitas lulusan pada akhirnya mampu memahami secara utuh dinamika pemerintahan yang sedang berlangsung dan tujuan dimasa depan.

Dalam persoalan kurikulum, peninjauan kembali mata kuliah mata kuliah inti dan pilihan dibahas dengan seksama untuk mengikuti dinamika politik, pemerintahan, sosial dan budaya. Tujuannya agar mata kuliah yang diajarkan beserta bobot Satuan Kredit Semester (sks) dapat menjawab kebutuhan skill dan pengetahuan sesuai kebutuhan zaman. Pada persoalan skripsi, pembahasan berfokus pada penajaman isu-isu strategis kekinian untuk skripsi sehingga perlu dibuatkan payung besar mengenai tema-tema besar yang nantinya menjadi panduan mahasiswa dalam mengambil judul skripsi. Tujuannya agar mahasiswa lebih memiliki banyak pilihan dalam melakukan riset skripsi.

Magang riset membahas kebutuhan Program Studi untuk



Dosen Prodi IP sedang terlibat diskusi perumusan visi misi Prodi

memperluas kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) seperti Perludem dan ICW. Selama ini program magang riset hanya berlangsung di instansi-instansi pemerintahan di Pusat (Kementerian) dan Daerah (Organisasi Perangkat Daerah), DPR RI dan DPRD.

Kedepannya mahasiswa diarahkan untuk melakukan magang riset di organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti Perludem yang telah memiliki *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Prodi Ilmu Pemerintahan dan OMS yang lainnya. Terakhir persoalan Sit In dibahas untuk menindaklanjuti program kunjungan belajar selama 4 bulan dari mahasiswa Khon Kaen university, Thailand. Program ini merupakan kerjasama Studi Exchange (SE) antara Ilmu Pemerintahan UMM dengan Khon Kaen university yang segera ditindaklanjuti (proses) transfer kredit.

Lokakarya Visi dan Misi Prodi menghasilkan kesepakatan dimana visi Prodi menjadi *Dynamic Government*. Keputusan ini didasarkan pada kajian Ilmu Pemerintahan yang semakin dinamis, yakni memahami bagaimana relasi antara negara, masyarakat dan pihak swasta. Sehingga, perlu rumusan baru untuk merespon dinamika sistem Pemerintahan Indonesia tersebut. Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap Kurikulum yang akan diselenggarakan nantinya. Sebagai contoh, isu tentang Maritim Governance, Human Security, dan Ketahanan Pangan, Studi Konstitusi menjadi kajian-kajian baru dalam Kurikulum Prodi IP. Kurikulum ini menjadi bidang keilmuan baru sehingga dapat menjadi pembeda dari Prodi-Prodi IP yang ada di kampus lain di seluruh Indonesia.

Dengan kata lain, ini menjadi kekhasan dari Prodi Ilmu Pemerintahan UMM yang memang *concern* di bidang penguatan peran Pemerintah dalam menghadapi dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta keamanan. []

Prodi IP Selenggarakan Seminar Hasil Magang Riset Mahasiswa

Bertempat di Aula Masjid, lantai 1, Prodi IP menyelenggarakan Seminar Hasil Mahasiswa selama mengikuti program Magang Riset (Sabtu, 22/12). Dalam kegiatan tersebut, satu per satu kelompok magang mempresentasikan hasil magang riset yang dilakukan selama 2 bulan tersebut. Presentasi Seminar Hasil dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan wilayah dimana mereka magang. Bertindak selaku penguji adalah para dosen Prodi Ilmu Pemerintahan. Presentasi tersebut merupakan tahap akhir dari rangkaian Magang Riset. Sehingga, presentasi tersebut juga menentukan lulus tidaknya mahasiswa. Tentunya, hasil-hasil riset dari para mahasiswa tersebut menjadi *stock of knowledge* untuk mengembangkan kajian dan penelitian di Prodi Ilmu Pemerintahan sendiri.

Salah satu program Unggulan Prodi Ilmu Pemerintahan adalah program Magang Riset. Secara singkat, Magang Riset adalah program wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa IP untuk mendapatkan pengetahuan serta pengalaman langsung mengenai tata kelola Pemerintahan. Dengan kata lain, mahasiswa belajar praktik tata kelola Pemerintahan langsung di Instansi atau Lembaga dimana mahasiswa magang. Perlu diketahui juga bahwa Magang Riset Pemerintahan ini diikuti oleh mahasiswa semester 7 selama 2 bulan. Periode ini, Prodi IP memberangkatkan 150 mahasiswa tersebar di berbagai Instansi dan Lembaga, baik di Pusat maupun di Daerah. Yakni, 7 Kementerian, DPR RI, Ombudsman Jawa Timur, 3 Instansi di Provinsi Jawa Timur, 1 perusahaan yang ada di



Mahasiswa Prodi IP mempresentasikan Laporan Magang Riset

Yogyakarta, KPU Kota Malang, 12 Instansi di Kota Malang, 17 Instansi Kota Batu, KPUD Kota Batu, 1 Instansi Kabupaten Malang, dan terakhir berada di Kantor Desa Landungsari.

Istimewanya, Program ini tidak hanya membekali mahasiswa pengalaman empiris, tetapi juga menuntut untuk melakukan riset berbasis tempat dimana mereka magang. Sehingga, manfaat dari program Magang Riset ini adalah, *pertama*,

memberikan pengalaman empiris kepada mahasiswa tentang praktik pemerintahan sesungguhnya. *Kedua*, memberikan ruang berfikir kritis melalui riset yang dilakukan sembari melaksanakan tugas Magang. Mahasiswa harus melakukan penelitian di tempat magang masing masing. Adapun temuan penelitian, akan dipresentasikan dalam Seminar Hasil untuk diuji apakah risetnya bagus atau tidak.

Melalui presentasi Seminar Hasil juga, Prodi IP mengevaluasi bagaimana pelaksanaan Magang Riset tahun ini. Sehingga, dapat menjadi masukan untuk melaksanakan program Magang Riset di tahun berikutnya. Namun demikian, presentasi Hasil Magang Riset berlangsung lancar dan sukses. Yang terpenting adalah, bahwa Program Magang Riset prodi IP menjadi penghubung dan pen jembatan bagi mahasiswa nantinya, untuk mencari pekerjaan setelah menyelesaikan tugas akhir. Sehingga, para mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dapat terserap bekerja di tempat dimana mereka magang. Tentunya, ini menjadi prestasi bagi Prodi IP yang mempedulikan lulusan atau alumninya. []

AGAMA DAN PANCASILA (Peran Agama dan Pancasila Didalam Mengatasi Eksistensi Korupsi di Indonesia)

"Di Indonesia, persoalan korupsi nyaris mejadi masalah hai biasa, korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan structural, cultural dan persoalan personal. Persoalan structural karena udah melekat dalam roda roda pemerintahan di sistemnya, termasuk partai politik, militer, penegak hukum, dan sebagainya hingga pusat sampai bawah. Sementara itu, persoalan cultural karena ada kelaziman yang terima sehingga menjadi kebiasaan dalam masyarakat di berbagai lingkungan social serta sifat korupsi yang telah menyatu di dalam kepribadian masyarakat Indonesia" (Dr. Bambang Widjajanto "Korupsi itu kafir")

Pernyataan diatas seakan menegaskan bahwa korupsi sudah menjadi kanker yang menyebar dalam tubuh Negara Indonesia. Praktik kotor immenjangkiti berbagai lembaga di Indonesia, mulai lembaga eksekutif hingga legislatif. Lebih parahnya lagilembaga penegak hukum juga ikut andil dalam carut marut praktik korupsi di Indonesia.

Jika dilihat dari dimensi sosiologis masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki banyak nilai-nilai sosial sebagai antitesa dalam menghadapi korupsi yang hidup di dalam masyarakat. Nilai gotong royong yang mengedepankan nilai etik, jiwa kebersamaan dan keadabanyang berlandaskan nilai-nilai ke-Tuhan-an tentunya menjadi dasar moral tindak pencegahan korupsi. Nilai etik tersebut harus terus di rekonstruksi secara berkesinambungan sehingga mampu menciptakan sebuah moral publik masyarakat Indonesia.

Jika kita melihat sejarah kebelakang tentang pendidikan yakni masa pasca kemerdekaan, Ir soekarno menentukan arah dan tujuan pendidikan ditekankan pada nilai nilai kebangsaan serta yakni melalui norma yang bersumber dari agama dan norma sosial dimasyarakat/ local wisdom atau etika yang baik di masyarakat. Norma layaknya sudah menjadi pedoman atau panutan manusia didalam menjalankan suatu perilaku di kehidupan sehari-hari. Moral dalam agama adalah sebuah panggilan iman, salah satunya adalah agama Islam. Islam mengajarkan dalam berperilaku harus didasarkan pada hati nurani/qolbu. Jika qolbu yang baik berarti manusia telah menjalankan pelomannya yang telah di perintahkan oleh Allah SWT.

Agama islam sebagai agama sempurna dan dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia seharusnya dapat menjadi pedoman Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sang Khalik, tetapi juga mengatur hubungan antara sesama manusia, bahkan manusia di dalam bernegara dan manusia dengan alam. Dalam beberapa hal, kualitas hubungan manusia dengan manusia merupakan refleksi antar manusia dengan Tuhanya. Adapun prinsip prinsip islam yang harus dijaga dan di jalankan semestinya agar terciptanya masyarakat yang harmonis dan beradab meliputi: amanat (amanah), keadilan, dan amar ma'ruf nahimunkar. Amanat merupakan suatu tanggung jawab yang wajib dijaga dan dilaksanakan

dengan sebaik baiknya, termasuk yang bersifat fisik, seperti harta dan jabatan. Dengan demikian, orang yang diberi amanat harta dan jabatan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan keluarga dan pribadinya, oleh karena itu di dalam islam juga sudah di sampaikan pada ayat yang terkandung pada al Qur'an

Salah seorang dari kedua putri Ya'kub berkata; Wahai Ayah-ku, pekerjaanlah ia (Musa a.s), karena sesungguhnya orang yang paling layak diberi pekerjaan adalah orang kuat (profesionalisme) dan dapat di percaya (al-ain). (Qs.AL-Qashshah <28> : 26)

Ayat diatas dengan tegas menjelaskan bahwa pentingnya asas profesionalisme dan integritas yang lurus, dan jika didalam menentukan pengangkatan pegawai atau pejabat itu dihilangkan, Rasulullah sudah mengingatkan akibat uruk yang menimpa : "Jika suatu perkara (amanat/pekerjaan) diserahkan kepada orang yang tidak profesional, maka tunggulah saat kehancuran. (HR. Bukhari, No. 6015)". Serta di dalam ajarannya agama islam memberikan ajaran bahwasanya kita semua adalah pemimpin, dan telah diajarkan beberapa prinsip yang penting terhadap pemimpin yaitu 1.) Amanat hamba kepada Allah, 2.) Amanat hamba kepada sesame, 3.) Amanat hamba kepada dirinya sendiri. Berdasarkan QS al-Mu'minin

Melihat ajaran agama yang sangat bertolak belakang dengan budaya korupsi, seharusnya mampu menjadi benteng individu yang di tunjukan melalui perilaku baik. Menuntut saya inilah nilai norma secara agama sudah tidak ada lagi ada di individu dan di lingkungan sosial masyarakat, dimana budaya baik tercipta melalui perilaku yang baik ini sudah jarang ditemui di negara kita yang di dapat dari norma bersumber pada agama. Seharusnya norma ini digali secara nilai yang diajarkan dalam merubah lingkungan budaya yang korup di lingkungan masyarakat dan negara.

Sejatinya Agama dan Pancasila merupakan memiliki peran yang sangat besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia dewasa ini, karena jika agama, dan pancasila dijadikan sebagai cerminan perilaku individu dan masyarakat maka akan menciptakan budaya pada lingkungan sosial yang baik pula. Tidak mudah meletakkan kedua unsur tersebut di tengah masyarakat dan lingkungan negara, hanya saja diperlukan keseriusan dan niat yang sama dari semua elemen, pada dasarnya ini agama dan pancasila adalah bukan hal yang baru di lingkungan masyarakat, hanya saja belum digunakan sebagai senjata dalam melemahkan budaya korupsi, saya yakin jika lingkungan dan budaya tercipta dengan baik melalui kedua unsur sentral tersebut, maka korupsi akan tidak mendapatkan ruang di Indonesia sebab banyaknya individu yang menolak keras praktik tersebut. Sehingga pada akhirnya eksistensi agama dan pancasila mampu mengulahkan eksistensi korupsi di negara kita, jangan mau korupsi sebagai budaya karena jelas korupsi bukan cerminan bangsa Indonesia. []



Oleh : Danang Kurniawan

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KOTA BATU



Oleh :
Nicky Nasliti Karya Dewi

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah kinerja pembangunan itu sendiri dalam membentuk kemandirian kebutuhan yang paling mendasar dari masyarakat yaitu berkenaan dengan aspek pangan. Ketahanan pangan sudah menjadi komitmen nasional bahkan dunia internasional. Hal ini didasari sebagai suatu upaya yang komprehensif melibatkan peran serta aparat pemerintahan dan juga peran serta masyarakat secara luas. Ketahanan pangan (*food security*) merupakan permasalahan yang mendasar dan perlu penanganan secara serius dan berkelanjutan. Hal ini berawal dari kenyataan bahwa jumlah penduduk semakin meningkat sedangkan kapasitas produksi pangan cenderung pada kondisi *leveling off*, karena adanya pemanfaatan lahan yang intensif dan disisi lain terjadinya alih fungsi lahan.

Sebuah rumah tangga dikategorikan tahan pangan jika memiliki persediaan pangan yang memadai. Secara spesifik dalam penjelasan Undang-Undang - Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan ketahanan pangan adalah sebuah situasi dimana manusia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara baik, merata, bermutu dan terjangkau dengan baik. Artinya persediaan pangan sebagai salah satu kebutuhan primer rumah tangga harus terpenuhi dari aspek jumlah, kualitas dan akses. Dalam konteks ini peran pemerintah sebagai pelayan sosial menjadi penting untuk memastikan setiap rumah tangga memperoleh layanan pangan yang maksimal. Batu merupakan salah satu contoh daerah yang belum memiliki ketahanan pangan yang baik. Dalam hal ini Kota Batu belum mampu memberikan pelayanan kesejahteraan yang merata untuk semua warganya. Hal tersebut diakibatkan oleh sumber daya lokal yang tidak terkelola secara maksimal sehingga pemerintah Kota Batu masih harus bekerjasama dengan Perum Bulog dalam mengatasi

persalahan ketersediaan bahan pangan.

Penyebab terjadinya krisis pangan di Kota Batu. Pertama, perkembangan jumlah penduduk yang cenderung tidak terkendali. Pada tahun 2017 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu tercatat memiliki jumlah penduduk sebesar 202.319 ribu jiwa. Kedua, perubahan peruntukan lahan pertanian ke sektor lain selain pertanian yang cenderung meningkat secara signifikan setiap tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, setiap tahun Kota Batu mengalami penyusutan lahan pertanian sebesar 5%-10%. Saat ini Kota Batu tercatat hanya memiliki lahan pertanian sekitar 97.000 hektare. Persoalannya adalah perubahan fungsi lahan yang demikian kerap kali dilakukan atas dasar pertimbangan ekonomi dan investasi seperti pembangunan pariwisata dan bangunan lainnya yang secara tidak langsung mengurangi lahan pertanian untuk kegiatan produksi.

Luas lahan sawah di Kota Batu Tahun 2017 sebesar 2.441,69 Ha, yang terdiri dari 716,63 Ha berada di Kec. Batu, 1.042 Ha terdapat di Kecamatan Junrejo dan sisanya 683,46 Ha di kecamatan Bumiaji. Lahan sawah memiliki manfaat langsung yang dimana berhubungan dengan penyediaan pangan, kesempatan kerja, sumberdaya pendapatan bagi masyarakat dan daerah. Untuk kawasan yang digunakan dalam lahan pertanian yang di tanam padi beradapada kecamatan Junrejo desa Pendem 157,00 Ha dengan produksi padi 904,99 ton pertahunnya. Dengan hasil panen padi yang begitu banyak belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Kota Batu yang dimana hal ini terlihat bahwa pemerintah masih bekerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan beras yang ada di Kota Batu dengan bekerjasama pihak perum Bulog Malang.

Beberapa wilayah yang masuk dalam kategori desa rawan pangan yaitu berjumlah 10 desa atau 41,6 persen tergolong dalam kategori sangat tahan pangan yaitu (desa Giriipurno, Pandanrejo, Gunung Sari, Junrejo, Mojorejo, Telukong, Pendem, Dadaprejo, Torongrejo, dan Oro-oro omblo). Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa persentase kedua terbesar adalah desa yang masuk kategori sangat rawan pangan yaitu berjumlah 9 desa atau 37,50 persen yaitu (desa sumberbrantas, Punten, Sumbergondo, Tuhungrejo, Sidomulyo, Sisir, Sumberejo, dan Temas). Sisanya yaitu masuk dalam kategori tahan 2 desa yaitu (desa Bulukerto dan Bumiaji), cukup tahan 2 desa yaitu (Beji dan Pesanggrahan), dan agak rawan 1 desa yaitu desa Songgokerto hal tersebut sudah mencakup keseluruhan desa/kelurahan di Kota Batu.

Pola strategi yang digunakan Dinas Ketahanan pangan jika dibaca lebih makro berusaha mengintegrasikan aspek mikro dan makro ekonomi yakni berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi sehingga secara otomatis akan mengurangi angka kemiskinan di daerah. Ketahanan pangan merupakan upaya pemerintah Kota Batu dalam

menumbuhkan ekonomi lokal sehingga stabilitas harga pangan dapat terjaga dengan baik. Dalam strategi ini pemerintah juga diarahkan untuk bisa mengurangi kemiskinan dan stabilisasi pasar pangan dengan pembangunan pertanian dan pedesaan sebagai proses pengikat dan penggerak dengan melalui program yang sudah dibentuk yaitu Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan program DEMAPAN (Desa Mandiri Pangan).

Konsep dalam pelaksanaan pelatihan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini yaitu setiap desa dan kecamatan yang ada di Kota Batu setiap desanya terdiri 1 kelompok yang beranggotakan minimal 30 rumah tangga yang lokasinya saling berdekatan dalam satu kawasan yang nantinya pelatihan ini akan menghasilkan kegiatan seperti sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan oleh tim penyuluh dari Dinas Ketahanan Pangan melalui metode sekolah lapang yang dimana kelompok tersebut akan langsung diajak mempraktikkan pengelolaan lahan pekarangan rumah lestari. Pelatihan ini dilaksanakan pada minggu ke dua di setiap kecamatan yang ada di Kota Batu dengan peserta dari setiap desa terdapat 1 kelompok dengan minimal 30 anggota. Pemberian bantuan untuk program kawasan rumah pangan lestari diberikan kepada kelompok wanita atau kelompok tani dan juga diberikan kepada tani posyandu. Dimana dalam hal ini terdapat perbedaan dari sumber pendanaan yang dimana sumber dana APBN diberikan langsung oleh Propinsi sedangkan APBD merupakan bantuan dana dari Kota.

Gagasan pentingnya adalah *pertama*, program ketahanan pangan hanya akan bisa berhasil jika lingkungan pertanian juga terjaga. Dalam hal ini upaya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian kontraproduktif dengan upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Kota Batu. *Kedua*, program-program peningkatan ketahanan pangan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Artinya program tersebut harus mampu melepaskan masyarakat dari lubang kemiskinan. Maka pemerintah juga harus memberikan insentif-insentif khusus, khususnya berupa bantuan teknologi dan modal kepada masyarakat miskin. Meningkatkan daya beli mereka tentunya akan secara langsung meningkatkan kualitas pangan mereka. *Ketiga*, aspek ketersediaan logistik/ pangan perlu terus dijaga. Pilihan melakukan kerjasama dengan pihak lain Bulog Kab. Malang perlu terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kota Batu yang memang secara produksi belum memadai. Ketersediaan ini juga untuk antisipasi jika sewaktu-waktu ada bencana alam atau gagal panen terjadi. *Keempat*, perlu pemetaan daerah rawan pangan yang lebih tepat agar solusi dalam pengambilan kebijakan dapat tepat sasaran. Informasi tersebut selanjutnya menjadi acuan ilmiah bagi Kota Batu sehingga dapat merancang kebijakan-kebijakan baru yang lebih baik dalam menyelesaikan problem ketahanan pangan. []

PROFIL DAN INFORMASI PENDAFTARAN PRODI ILMU PEMERINTAHAN

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Visi Merupakan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM sebagai pusat pendidikan yang unggul dalam penerapan ilmu serta praktik pemerintahan bertaraf internasional untuk mendukung terwujudnya *Effective Government* sebagai pemerintahan nilai-nilai Islam.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola pikir, wawasan, dan keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu Pemerintahan yang berorientasi pada pemerintahan daerah (*local government*) yang berdaya saing internasional.
2. Mengembangkan riset dan kajian Ilmu Pemerintahan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif (*effective government*).
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*).
4. Meningkatkan jaringan kelen bagean yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi (TKI).
5. Meningkatkan kompetensi keilmuan dan keterampilan pemerintahan bagi mahasiswa agar berdaya saing internasional dan berakhlak mulia.

Tujuan Pembelajaran :

1. Menguasai dasar-dasar Ilmu Pemerintahan dan keterampilan dasar bidang Pemerintahan.
2. Mampu mengidentifikasi permasalahan di bidang Pemerintahan.
3. Mampu mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan pemerintahan secara komprehensi dan akurat.

4. Menguasai prinsip dasar demokrasi guna mewujudkan masyarakat sipil yang berdaya saing.
5. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab etik dalam mengemban amanah sebagai ilmuwan dan praktisi Ilmu Pemerintahan.

Tempat Pendaftaran :

UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 6514, Telp.0341-464318-19 Psw. 139.
Fax. 0341-460435, 460782, e-mail:pmb@umm.ac.id.

Pendaftaran on-line : pmb.umm.ac.id, call center: 162 341 463513.

Jalur Pendaftaran :

Program Jalur Unggulan/ Jalur Prestasi & PMDK; Program Reguler; Program Beasiswa Khusus Yaitin / Yaitin-2; Program Beasiswa PPUT; Program Transfer dan Afil Jenjang

Prosedur Pendaftaran :

- a. Mengisi biodata peserta secara *online* pmb.umm.ac.id
- b. Melakukan pembayaran secara transfer melalui BNI No. Rek. 6006002454 (Tidak menerima transfer pembayaran via ATM/SMS Banking/ e-Banking)
- c. Formulir cetak *online* dan semua berkas syarat pendaftaran dimasukkan dalam amplop coklat dan dikirim ke alamat: **UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang** Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
- d. Pengiriman Berkas pendaftaran melalui pos dan *email*.